

Menembus Sekat, Mengukir Prestasi: Perkembangan dan Transformasi MAN 1 Klaten dari Kelas Filial ke Madrasah Unggulan dalam Pusaran Kebijakan Pendidikan Nasional (1979–2023)

Moya Nanda Jenie Noerida ^{a,1}, Moh Mahbub ^{b,2}, Nor Huda ^{c,3}, Muh. Fajar Shodiq ^{d,4}

^a UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

^b UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

^c UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

^d UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

¹ rikamarfuah21@gmail.com; ² muhmahbub03@gmail.com

* Corresponding Author; Moya Nanda Jenie Noerida



Received 04 Desember 2025; accepted 17 Desember 2025; published 30 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the transformation of Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Klaten from a filial class into a leading Islamic senior high school within the dynamics of Indonesian national education policies from 1979 to 2023. The research aims to analyze the institutional transformation of MAN 1 Klaten, the influence of national education policies on its development, and the adaptation strategies implemented by the madrasah in maintaining its Islamic identity amid modernization. This study employs historical research methods, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected from archival documents, ministerial decrees, curriculum documents, interviews, and relevant literature. The analysis uses institutionalization theory to explain the process of legitimacy, integration, and modernization of madrasah within the national education system. The findings reveal that the transformation of MAN 1 Klaten was strongly influenced by the Joint Decree of Three Ministers in 1975 and the National Education System Law of 2003, which strengthened the integration of religious and general education. Institutional changes, curriculum reforms, and educational modernization enabled MAN 1 Klaten to develop into a leading madrasah while maintaining its Islamic identity. This study demonstrates that Islamic educational institutions possess a strong capacity for adaptation and institutional transformation within the framework of national education modernization.

KEYWORDS

Institutionalization,
Madrasah
Transformation;
National Education
Policy;
Islamic Education.

This is an open-
access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



1. Pendahuluan

Lahirnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari munculnya ide-ide pembaruan di kalangan umat Islam pada awal abad ke-20. Para pelajar Indonesia yang kembali dari Timur Tengah membawa gagasan modernisasi pendidikan yang mendorong perubahan sistem pendidikan Islam dari pola tradisional menuju sistem yang lebih terstruktur. Transformasi ini menjadi titik awal lahirnya lembaga pendidikan Islam formal yang lebih sistematis (Daulay, 2007, hlm. 96).

Pada tahap awal, pendidikan Islam dilaksanakan di masjid, surau, dan pesantren dengan metode halaqah, hafalan, dan ceramah. Kurikulum yang diajarkan berfokus pada Al-Qur'an, hadis, dan kitab kuning. Sistem ini memiliki kekuatan dalam penguasaan ilmu agama, namun masih terbatas dalam menjawab kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan modern (Mudzakkir, Naro, & Yahdi, 2024, hlm. 176). Masuknya sistem pendidikan kolonial Hindia Belanda membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Sekolah-sekolah kolonial lebih menekankan pengajaran ilmu umum dan bersifat netral terhadap agama, sebagaimana diatur dalam Indische Staatsregeling. Hal ini menimbulkan dualisme pendidikan antara sekolah umum dan pendidikan Islam (Roihan Daulay, 2021, hlm. 98).

Kondisi tersebut mendorong lahirnya madrasah sebagai bentuk respon umat Islam terhadap sistem pendidikan kolonial. Madrasah hadir sebagai lembaga yang mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu umum dalam satu sistem pendidikan. Dengan demikian, madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai institusi pendidikan modern (Peraturan Menteri Agama, 2014, Pasal 46–48). Dalam perkembangannya, madrasah menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pengakuan formal dari pemerintah. Pada masa awal kemerdekaan, madrasah belum sepenuhnya diakui setara dengan sekolah umum, sehingga lulusan madrasah sering mengalami kendala dalam melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja (Daulay, 2009, hlm. 89).

Upaya integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional mulai menguat pada masa Orde Baru. Pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975 yang memberikan kesetaraan antara madrasah dan sekolah umum. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia (Alfarisi & Bakar, 2022, hlm. 88).

Melalui SKB Tiga Menteri, madrasah diwajibkan mengadopsi kurikulum terpadu dengan komposisi 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas lulusan madrasah agar mampu bersaing secara nasional tanpa kehilangan identitas keislamannya (Departemen Agama RI, 2005, hlm. 88). Penguatan posisi madrasah semakin jelas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa madrasah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah umum (UU Sisdiknas, 2003).

Madrasah Aliyah Negeri 1 Klaten merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan yang mengalami transformasi dalam dinamika tersebut. Madrasah ini berdiri pada tahun 1979 dengan nama Madrasah Aliyah Negeri Klaten Filial Surakarta sebagai hasil inisiatif masyarakat, khususnya dari kalangan Muhammadiyah (Wawancara Hatifah, 2024, 27 Agustus). Seiring perkembangannya, madrasah ini mengalami berbagai perubahan kelembagaan, termasuk perubahan nama dan status. Penegerian madrasah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1991 menjadi titik penting dalam transformasi tersebut, yang kemudian diikuti perubahan nama menjadi MAN 1 Klaten pada tahun 2018 (KMA No. 137, 1991).

Selain perubahan kelembagaan, MAN 1 Klaten juga mengalami perkembangan dalam sistem dan kurikulum pendidikan. Madrasah ini telah melalui berbagai perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1999, KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman (Creswell, 2014, hlm. 39).

Berdasarkan kajian literatur, penelitian mengenai sejarah dan perkembangan MAN 1 Klaten masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek religiusitas dan manajemen pendidikan, sehingga kajian historis mengenai transformasi kelembagaan belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut serta mendokumentasikan perjalanan sejarah MAN 1 Klaten sebagai bagian dari dinamika pendidikan Islam di Indonesia.

Artikel ini berargumen bahwa transformasi MAN 1 Klaten tidak sekadar menunjukkan perkembangan kelembagaan pendidikan Islam, tetapi juga mencerminkan proses integrasi struktural antara kebijakan pendidikan nasional dan adaptasi madrasah terhadap modernisasi pendidikan di tingkat lokal. Melalui perubahan status, kurikulum, dan sistem pendidikan, MAN 1 Klaten menunjukkan bagaimana madrasah mampu mempertahankan identitas keislamannya sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan negara modern.

2. Literatur Review

Penelitian mengenai transformasi pendidikan Islam di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama terkait modernisasi madrasah dan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Azyumardi Azra menjelaskan bahwa modernisasi pendidikan Islam merupakan bagian dari proses reformasi sosial yang bertujuan menyesuaikan pendidikan Islam dengan perkembangan masyarakat modern. Modernisasi tersebut terlihat dalam perubahan kurikulum, sistem kelembagaan,

dan pengelolaan pendidikan. Selain itu, Maksun menegaskan bahwa madrasah mengalami perkembangan signifikan setelah munculnya kebijakan integrasi pendidikan nasional, khususnya melalui SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang memberikan legitimasi formal terhadap madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut mendorong madrasah untuk mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum secara seimbang.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas modernisasi madrasah dalam perspektif kebijakan nasional dan pengembangan kurikulum, sedangkan kajian mengenai transformasi kelembagaan madrasah di tingkat lokal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian mengenai MAN 1 Klaten menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan nasional diimplementasikan secara konkret pada level lokal. Penelitian ini menggunakan teori institusionalisasi untuk menganalisis proses transformasi MAN 1 Klaten. Dalam perspektif teori institusionalisasi, perubahan lembaga dipahami sebagai proses memperoleh legitimasi, stabilitas, dan pengakuan formal dalam sistem sosial yang lebih luas. Transformasi MAN 1 Klaten dapat dilihat melalui perubahan status kelembagaan, integrasi kurikulum nasional, modernisasi sistem pendidikan, serta penguatan identitas kelembagaan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas perkembangan historis MAN 1 Klaten, tetapi juga menjelaskan bagaimana madrasah bertransformasi sebagai institusi pendidikan Islam modern yang mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah untuk mengkaji transformasi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Klaten dalam dinamika kebijakan pendidikan nasional tahun 1979–2023. Metode sejarah dipilih karena penelitian ini berfokus pada peristiwa masa lampau yang dikaji secara sistematis dan kritis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai proses perubahan kelembagaan madrasah. Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah dilakukan melalui tahapan pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013, hlm. 70).

Tahap pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik dilakukan berdasarkan pertimbangan kedekatan intelektual peneliti serta ketersediaan sumber yang relevan. Topik mengenai transformasi MAN 1 Klaten dipilih karena memiliki nilai historis dan belum banyak dikaji secara mendalam dalam perspektif sejarah pendidikan Islam. Selain itu, topik ini dinilai penting untuk mendokumentasikan perkembangan lembaga pendidikan Islam di tingkat lokal dalam kaitannya dengan kebijakan nasional (Kuntowijoyo, 2013, hlm. 71).

Tahap kedua adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang relevan, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan meliputi arsip resmi seperti Surat Keputusan Menteri Agama, dokumen kurikulum, serta hasil wawancara dengan pihak terkait seperti kepala madrasah dan guru. Sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia (Sulasman, 2014, hlm. 93).

Pengumpulan sumber lisan dilakukan melalui teknik wawancara terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang sistematis dan meminimalisasi bias dalam pengumpulan informasi. Informan dipilih secara representatif berdasarkan keterlibatan langsung dalam perkembangan MAN 1 Klaten, seperti tenaga pendidik dan pihak manajemen madrasah. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi historis yang tidak tercatat dalam dokumen tertulis (Thompson, 2000, hlm. 45).

Tahap ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi dilakukan untuk menguji keabsahan dan kredibilitas sumber yang digunakan. Kritik sumber terdiri dari dua tahap, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk memastikan keaslian sumber, seperti waktu, penulis, dan bentuk fisik dokumen. Sementara itu, kritik internal dilakukan untuk menilai isi sumber, termasuk konsistensi dan kebenaran informasi yang disampaikan (Kuntowijoyo, 2001, hlm. 87).

Tahap keempat adalah interpretasi. Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Interpretasi dilakukan dengan cara

menghubungkan fakta satu dengan yang lain sehingga membentuk pemahaman yang utuh mengenai proses transformasi MAN 1 Klaten. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teori institusionalisasi untuk menjelaskan proses legitimasi, integrasi, dan modernisasi MAN 1 Klaten dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan kebijakan pendidikan nasional mempengaruhi perkembangan kelembagaan, sistem pendidikan, dan identitas madrasah (Kuntowijoyo, 2003, hlm. 78).

Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan proses penyusunan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan menjadi sebuah narasi yang sistematis dan kronologis. Penulisan dilakukan dengan memperhatikan kaidah ilmiah serta keterkaitan antar peristiwa sehingga menghasilkan karya sejarah yang utuh dan komprehensif (Kuntowijoyo, 2006, hlm. 73).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, baik arsip, wawancara, maupun literatur, untuk memastikan keabsahan informasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi (Creswell, 2014, hlm. 39). Dengan menggunakan metode sejarah yang sistematis dan didukung oleh berbagai sumber yang valid, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai transformasi MAN 1 Klaten dalam konteks kebijakan pendidikan nasional.

4. Pembahasan

4.1. Perkembangan MAN 1 Klaten dalam Perspektif Teori Institusionalisasi

Perkembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Klaten tidak hanya menunjukkan perubahan administratif semata, tetapi juga mencerminkan proses institusionalisasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dalam perspektif teori institusionalisasi, transformasi lembaga dipahami sebagai proses memperoleh legitimasi, stabilitas, pengakuan formal, dan integrasi ke dalam sistem sosial yang lebih luas (Azyumardi, 2012, hlm. 45). Proses tersebut terlihat jelas dalam perjalanan MAN 1 Klaten sejak berdiri sebagai kelas filial hingga berkembang menjadi madrasah unggulan.

Pada tahap awal berdirinya tahun 1979 sebagai MAN Filial Surakarta, keberadaan madrasah masih berada dalam tahap awal institusionalisasi. Pada fase ini, madrasah belum memiliki otonomi penuh karena masih bergantung pada lembaga induk di Surakarta, baik dalam aspek administrasi maupun pengelolaan pendidikan. Namun demikian, keberadaan MAN Filial Surakarta di Klaten menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam formal yang mampu mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum (Daulay, 2007, hlm. 96).

Proses institusionalisasi mulai mengalami penguatan ketika pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan integrasi pendidikan nasional, khususnya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975. Kebijakan tersebut menjadi dasar penting dalam memberikan legitimasi formal terhadap madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Melalui kebijakan tersebut, madrasah tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan alternatif, tetapi sebagai institusi pendidikan formal yang memiliki kedudukan setara dengan sekolah umum (Alfarisi & Bakar, 2022, hlm. 88).

Dalam konteks MAN 1 Klaten, implementasi kebijakan tersebut terlihat melalui penyesuaian kurikulum, sistem pembelajaran, dan struktur kelembagaan. Madrasah mulai mengadopsi kurikulum nasional dengan komposisi pendidikan umum dan pendidikan agama yang lebih terintegrasi. Proses ini menunjukkan adanya adaptasi kelembagaan terhadap tuntutan sistem pendidikan nasional tanpa meninggalkan identitas keislamannya (Maksum, 1999, hlm. 112).

Penguatan institusionalisasi semakin terlihat setelah terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1991 tentang penegerian madrasah. Status negeri memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap keberadaan MAN 1 Klaten dalam struktur pendidikan nasional. Selain meningkatkan pengakuan formal dari negara, penegerian juga memperkuat stabilitas organisasi melalui dukungan pemerintah dalam aspek administrasi, pembiayaan, dan pengembangan sumber daya manusia (KMA No. 137, 1991).

Perubahan nama dari MAN Filial Surakarta menjadi MAN Karanganyar, kemudian menjadi MAN 1 Klaten pada tahun 2018, juga menunjukkan proses penguatan identitas kelembagaan. Dalam teori institusionalisasi, perubahan nomenklatur dan status lembaga merupakan bagian dari proses memperoleh legitimasi sosial dan birokratis. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menunjukkan meningkatnya posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional (KMA No. 211, 2015). Selain perubahan kelembagaan, proses institusionalisasi MAN 1 Klaten juga terlihat dalam modernisasi sistem pendidikan dan kurikulum. Madrasah terus menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional melalui penerapan berbagai kurikulum, mulai dari kurikulum 1999, KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Adaptasi tersebut menunjukkan kemampuan lembaga dalam mempertahankan relevansi pendidikan di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi (Creswell, 2014, hlm. 39).

Hatifah menjelaskan bahwa perubahan kurikulum di MAN 1 Klaten dari masa ke masa menuntut madrasah untuk terus menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan pendidikan nasional tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas utama madrasah. Hal tersebut terlihat dari penerapan Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka yang mulai menekankan penguatan kompetensi dan karakter peserta didik (Wawancara Hatifah, 27 Agustus 2024). Modernisasi tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada penguatan karakter religius peserta didik. Dalam konteks ini, MAN 1 Klaten berupaya mempertahankan identitas pendidikan Islam melalui pengembangan budaya religius, kegiatan keagamaan, dan pembentukan karakter Islami. Dengan demikian, institusionalisasi MAN 1 Klaten tidak menghilangkan identitas keislamannya, melainkan memperkuat posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam modern.

Keberhasilan transformasi MAN 1 Klaten juga dipengaruhi oleh hubungan antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kepemimpinan madrasah, manajemen kelembagaan, dan kualitas tenaga pendidik memiliki peran penting dalam mendorong perubahan lembaga. Sementara itu, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, dukungan masyarakat, dan perkembangan pendidikan nasional turut mempercepat proses institusionalisasi madrasah (Hefner, 2009, hlm. 127).

Dengan demikian, perkembangan MAN 1 Klaten menunjukkan bahwa madrasah memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi dinamika pendidikan nasional. Dalam perspektif teori institusionalisasi, transformasi tersebut mencerminkan keberhasilan madrasah dalam memperoleh legitimasi formal, memperkuat stabilitas kelembagaan, dan menyesuaikan diri dengan modernisasi pendidikan tanpa kehilangan identitas keislamannya.

4.2. Transformasi MAN 1 Klaten menjadi sekolah Unggulan

Transformasi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Klaten merupakan bagian integral dari dinamika perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Secara historis, madrasah lahir sebagai respon terhadap sistem pendidikan kolonial yang cenderung mengabaikan pendidikan agama. Kehadiran madrasah menjadi bentuk sintesis antara tradisi pendidikan Islam dan sistem pendidikan modern (Daulay, 2007, hlm. 96).

Pada fase awal, pendidikan Islam masih didominasi oleh sistem tradisional seperti pesantren dan surau dengan metode pembelajaran halaqah dan hafalan. Sistem ini menekankan penguasaan ilmu agama, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan umum (Mudzakkir, Naro, & Yahdi, 2024, hlm. 176). Masuknya pendidikan kolonial Hindia Belanda memperkuat dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Sekolah kolonial lebih menekankan ilmu umum dan bersifat sekuler, sementara pendidikan Islam berkembang secara mandiri. Kondisi ini mendorong lahirnya madrasah sebagai alternatif pendidikan yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut (Roihan Daulay, 2021, hlm. 98).

Madrasah kemudian berkembang sebagai lembaga pendidikan formal yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan sistem pendidikan modern. Hal ini menjadikan madrasah sebagai institusi yang memiliki identitas unik, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter religius (Peraturan Menteri Agama, 2014, Pasal 46–48). Pada masa awal kemerdekaan, madrasah menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pengakuan formal dari pemerintah. Dualisme sistem pendidikan menyebabkan madrasah berada dalam posisi marginal dan belum sepenuhnya diakui setara dengan sekolah umum (Daulay, 2009, hlm. 89). Perubahan signifikan mulai terjadi pada masa Orde Baru dengan adanya kebijakan integrasi pendidikan

nasional. Pemerintah mulai menyadari pentingnya madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga berbagai kebijakan mulai diarahkan untuk meningkatkan kualitas madrasah (Alfarisi & Bakar, 2022, hlm. 88).

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975 menjadi tonggak penting dalam proses integrasi madrasah. Kebijakan ini memberikan pengakuan formal terhadap madrasah dan menegaskan kesetaraan dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional. Implementasi SKB Tiga Menteri membawa perubahan dalam struktur kurikulum madrasah, yaitu dengan mengintegrasikan mata pelajaran umum dan agama. Komposisi 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama menjadi standar baru dalam pendidikan madrasah (Departemen Agama RI, 2005, hlm. 88).

Dalam konteks ini, MAN 1 Klaten muncul sebagai salah satu madrasah yang berkembang dalam arus kebijakan tersebut. Berdiri pada tahun 1979 sebagai MAN Filial Surakarta, madrasah ini merupakan hasil inisiatif masyarakat yang menginginkan pendidikan Islam yang berkualitas (Wawancara Hatifah, 2024, 27 Agustus). Pada tahap awal, MAN 1 Klaten menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia. Namun, semangat masyarakat dan dukungan tokoh lokal menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan madrasah.

Transformasi kelembagaan mulai terlihat dengan adanya penegerian madrasah pada tahun 1991 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1991. Status negeri memberikan legitimasi serta dukungan yang lebih besar dari pemerintah (KMA No. 137, 1991). Perubahan nama madrasah dari MAN Filial Surakarta menjadi MAN Karanganyar, dan kemudian menjadi MAN 1 Klaten pada tahun 2018 menunjukkan adanya penguatan identitas kelembagaan. Perubahan ini mencerminkan perkembangan madrasah yang semakin mapan (KMA No. 211, 2015).

Selain aspek kelembagaan, transformasi juga terjadi dalam sistem kurikulum. MAN 1 Klaten telah mengalami berbagai perubahan kurikulum yang mengikuti kebijakan nasional, mulai dari kurikulum 1999 hingga Kurikulum Merdeka (Creswell, 2014, hlm. 39). Perubahan kurikulum ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kompetensi peserta didik.

Pada era reformasi, pendidikan Islam mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Kebijakan pendidikan mulai menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Jika dianalisis melalui teori perubahan sosial, transformasi MAN 1 Klaten mencerminkan proses evolusi dari lembaga tradisional menuju lembaga modern. Perubahan ini terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor (Martono, 2012, hlm. 361).

Faktor internal seperti kepemimpinan madrasah, kualitas tenaga pendidik, dan manajemen kelembagaan memiliki peran penting dalam proses transformasi tersebut. Sementara itu, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, dukungan masyarakat, dan perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi perkembangan madrasah. Sinergi antara faktor internal dan eksternal menjadi kunci keberhasilan transformasi MAN 1 Klaten. Madrasah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Dengan demikian, transformasi MAN 1 Klaten dari kelas filial menjadi madrasah unggulan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa madrasah memiliki peran strategis dalam pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Walaupun kebijakan integrasi madrasah melalui SKB Tiga Menteri berhasil meningkatkan legitimasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan baru bagi lembaga pendidikan Islam. Dominasi mata pelajaran umum dalam struktur kurikulum menyebabkan sebagian madrasah mengalami dilema dalam mempertahankan kekhasan pendidikan keislamannya.

Dalam konteks MAN 1 Klaten, tantangan tersebut direspons melalui penguatan budaya religius, kegiatan keagamaan, dan pembentukan karakter Islami peserta didik. Dengan demikian, transformasi MAN 1 Klaten tidak hanya menunjukkan keberhasilan adaptasi terhadap modernisasi pendidikan, tetapi juga memperlihatkan proses negosiasi antara tuntutan negara modern dan upaya mempertahankan identitas pendidikan Islam.

Selain itu, modernisasi madrasah juga memunculkan perubahan orientasi pendidikan. Madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai institusi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif dalam bidang akademik dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah memiliki kemampuan untuk bertransformasi secara dinamis tanpa kehilangan identitas dasarnya sebagai lembaga pendidikan Islam.

Transformasi MAN 1 Klaten juga memperlihatkan bahwa keberhasilan institusionalisasi pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan pemerintah, kepemimpinan lembaga, dan dukungan masyarakat. Hubungan tersebut menciptakan proses perubahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan kultural.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Klaten dari kelas filial menjadi madrasah unggulan merupakan bagian dari dinamika perkembangan madrasah dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Proses transformasi ini berlangsung secara bertahap sejak berdirinya pada tahun 1979 sebagai MAN Filial Surakarta, hingga mengalami perubahan status menjadi madrasah negeri pada tahun 1991, serta perubahan nama menjadi MAN 1 Klaten pada tahun 2018. Perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan status kelembagaan sekaligus penguatan posisi madrasah dalam struktur pendidikan nasional.

Transformasi MAN 1 Klaten juga dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan pendidikan nasional, khususnya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kebijakan tersebut mendorong integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum, yang tercermin dalam perubahan kurikulum serta sistem pembelajaran di madrasah. Dengan demikian, madrasah tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan semata, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kedudukan setara dengan sekolah umum.

Selain faktor kebijakan, keberhasilan transformasi MAN 1 Klaten juga didukung oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepemimpinan, kualitas tenaga pendidik, serta manajemen kelembagaan, sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan masyarakat, perkembangan sosial, dan kemajuan teknologi. Sinergi antara faktor-faktor tersebut memungkinkan madrasah untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, transformasi MAN 1 Klaten menunjukkan bahwa madrasah memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Hal ini menegaskan bahwa madrasah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter religius, sehingga relevan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia.

References

- Azra, Azyumardi. 2012. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Alfarisi, Salman, dan Yunus Abu Bakar. 2022. "SKB 3 Menteri dan Implikasinya pada Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Daulay, Hidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daulay, Hidar Putra. 2009. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2005. *Sejarah Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

- Hefner, Robert W. 2009. *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 1991. *Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1991 tentang Pembukaan dan Pengerian Madrasah*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam*.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2006. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maksum. 1999. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mudzakkir, Ahmad, Wahyuddin Naro, dan Muhammad Yahdi. 2024. "Sejarah Pendidikan Islam: Karakter Pendidikan Islam Klasik & Modern." *Indonesian Journal of Islamic Educational Review*.
- Roihan Daulay, Muhammad. 2021. "Sejarah Madrasah di Indonesia (Pendekatan Sejarah dan Perkembangannya)." *Forum Paedagogik*.
- Sulasman. 2014. *Metode Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thompson, Paul. 2000. *The Voice of the Past: Oral History*. Oxford: Oxford University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wawancara dengan Hatifah, Guru MAN 1 Klaten, 27 Agustus 2024.